**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG**

**PERKAWINAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

* 1. **Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran manusia lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidupnya, termasuk pemenuhan kebutuhan biologisnya. Manusia normal memiliki kecenderungan untuk berpasangan. manusia membutuhkan pasangan tempat ia berbagi pengalaman atau sekedar teman untuk bercerita. Dalam hal ini Imam al-Ghazali berkata, “Sesungguhnya pernikahan bisa menjadi penolong bagi agamamu. Bisa pula menjadi penghancur setan atau bisa menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah swt. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi”.[[1]](#footnote-1) Allah swt berfirman dalam surat *An-Nisa* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  ﴿النساء:١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Selain itu, Islam juga menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan terapi kebajikan dan kesalehan . Allah swt berfirman dalam surat *Ar-Ra’d* ayat 13:

|  |
| --- |
| http://www.dudung.net/images/quran/13/13_38.png |

 “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu'jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.

1. Definisi Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa arab, *nakaha-yankihu-nika>han*, artinya bergaul atau bercampur. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2)

Dari kedua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa nikah merupakan suatu perjanjian yang sakral dan kekal antara pria dan wanita untuk bersama-sama saling mengikat serta hidup bersama membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian, ketentraman dan cinta kasih.[[3]](#footnote-3)

1. Tujuan Pernikahan

Kehadiran syariat Islam di tengah-tengah umat manusia dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup dan meningkatkan martabat manusia ke tingkat yang lebih luhur dan suci. Al-Qura>n sebagai petunjuk hidup senantiasa mengingatkan bahwa manusia akan memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya, sepanjang mereka tetap setia kepada fitrah dan tetap mengikuti jalan kebenaran. Fitrah manusia yang lain di samping keimanan adalah adanya hubungan tarik-menarik yang bersifat alami antara laki-laki dan perempuan.[[4]](#footnote-4)

Perkawinan juga merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata yaitu, kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak serta kebebasan untuk memilih.[[5]](#footnote-5) Tujuan dari perkawinan juga tersirat dalam Al-Qura>n surat *Ar-Ru>m* ayat 21 :



Dan di antara kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.[[6]](#footnote-6) Pada mulanya seseorang tertarik pada lawan jenisnya karena pertimbangan fisik atau jasmani. Saling ketertarikan tersebut menimbulkan *mah}abbah* yang merupakan fase yang paling primitif atau rendah. Dari *mah}abbah* menuju ke tingkat yang lebih matang dan kuat yang disebut dengan mawadah. Pada umumnya dalam fase ini, berpotensi lebih mendalam karena mempunyai motivasi dan kesejatian yang lebih mendalam. Mawadah biasa diterjemahkan menjadi cinta dan kasih sayang.[[7]](#footnote-7)

Dari mawadah berkembang menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu rahmah. Term rahmah itu terulang sebanyak 330 kali dalam Al-Qura>n. Keluarga yang rahmah adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga harus diperhatikan. Fungsi personal disimbolkan dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, shalat dan bertakwa. Sedangkan fungsi sosial disimbolkan dengan membayar zakat, *amar ma’ruf nahi munkar*, tolong-menolong dan lain-lain.[[8]](#footnote-8)

Wujud cinta yang demikian akhirnya akan menghadirkan perasaan aman dan sentosa dalam hati yang hakiki (sakinah). Semua itu akan terjadi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam tali pernikahan dan hidup dalam rumah tangga yang Islami.[[9]](#footnote-9)

1. Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Di bawah ini ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu :[[10]](#footnote-10)

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakaannya. Seseorang dapat dikategorikan wajib untuk menikah apabila dirinya telah mempunyai calon isteri atau suami, siap untuk melaksanakan kewajiban baik lahir maupun batin serta khawatir akan terjerumus dalam perzinaan.[[11]](#footnote-11) Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang di haramkan adalah wajib. Maka pernikahan menjadi salah satu jalan untuk terhindar dari perzinaan. Nabi saw, bersabda yang artinya :

Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah siap untuk menikah, maka nikahlah. Sesunggguhnya nikah itu dapat menahan pandangan dan menyelamatkan kemaluan dan barangsiapa tidak mampu maka berpuasalah karena sesungguhnya dia (akan) menjadi perisai. (HR. Bukhari)

Imam Qurthubi berpendapat, “Bagi seseorang yang sudah mampu dan khawatir akan membahayakan diri dan agamanya jika tidak segera menikah, karena bisa saja ia terjerumus pada hal-hal yang menyimpang dan tidak dapat ditolong kecuali dengan pernikahan.[[12]](#footnote-12) Dalam kondisi seperti ini maka diwajibkan baginya untuk menikah. Apabila sudah ada keinginan yang kuat, namun belum mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinnya, niscaya Allah swt akan memampukan mereka. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat *An-Nuur* ayat 33,

.

|  |
| --- |
| http://www.dudung.net/images/quran/24/24_33.png |

“Bagi orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya hingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”

1. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt, serta memenuhi kewajiban pernikahan seperti membayar mahar, memberi nafkah maupun yang lainnya. Namun dalam kondisi yang demikian, menikah tetap lebih utama karena Rasulullah pernah mengingatkan umat Islam untuk tidak melajang selamanya seperti pendeta-pendeta nasrani.[[13]](#footnote-13)

1. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah lahir maupun batin kepada isteri. Sama halnya dengan kondisi subjektif yang bersangkutan tidak mendukung akan keberhasilan rumah tangga, misalnya keadaan jasmani yang sakit-sakitan, anggota badan tidak berfungsi atau laki-laki yang tidak mampu dimana hidupnya nanti akan dibiayai dengan menggunakan harta kekayaan isteri yang menjadi pasangannya sepanjang tidak mengakibakan kerusakan. Akan tetapi, apabila penyakit, keadaan impotensi maupun masalah nafkah dan harta akan mengakibatkan kerusakan, maka haram hukumnya pernikahan tersebut.[[14]](#footnote-14)

1. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi mereka yang di pandang telah mampu memenuhi kewajiban dalam pernikahan, baik secara lahir maupun batin, tetapi dihawatirkan akan menyusahkan isterinya karena sesuatu hal. Status hukum ini juga berlaku bagi seseorang yang mengalami lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah, sedangkan calon isteri tidak menuntut keduanya karena kaya dan dorongan seksualnya rendah.[[15]](#footnote-15)

1. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum tertentu, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Adapun yang menjadi rukun nikah adalah :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yang logis, bahwa tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan jika hanya ada seorang laki-laki saja atau perempuan saja. Di samping itu, kedua calon mempelai harus jelas laki-laki atau perempuan.[[16]](#footnote-16)

Dari kebanyakan akad, maka pihak yang melakukan akad disyaratkan mempunyai sifat *ahliyyatul-ada’* (kecakapan bertindak) yang sempurna yaitu telah dewasa, berakal sehat dan tidak overmacht (makruhan). Demikian juga dalam akad nikah pihak yang melakukan akadnya sebagai unsur pertama dan kedua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, keduanya harus mempunyai *ahliyyatul-ada’* yang sempurna. Jadi anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang menderita sakit ingatan , tidak sah melakukan akad nikah sendiri. Anak yang sudah *mumayyiz* tetapi belum dewasa dipandang tidak sempurna kecakapannya sehingga apabila hendak melakukan akad nikah wajib dengan izin walinya. Adapun mempelai perempuan selamanya dianggap tidak cakap melakukan akad nikah sendiri tetapi dilakukan oleh walinya. Hanya manakala mengikuti madzhab Hanafi ada kemungkinan bagi mempelai perempuan melakukan akad nikah sendiri yaitu jika ia adalah janda dan sudah dewasa.[[17]](#footnote-17)

1. Wali

Yaitu ayah kandung, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ‘*as}abah* wanita tersebut atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut.

1. Dua orang saksi

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya saksi seperti halnya wali nikah, karena saksi merupakan salah satu rukun yang harus ada. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat (2), menyebutkan bahwa, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Begitu juga dalam firman Allah swt dalam surat atthalaq (65) ayat 2 :

..

|  |
| --- |
| http://www.dudung.net/images/quran/65/65_2.png |

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar*.

Lain halnya dengan Imam Malik, kehadiran saksi pada saat akad nikah tidaklah wajib, akan tetapi cukup hanya dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak.[[18]](#footnote-18) Agar kesaksian seseorang dapat diterima, maka seorang saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[[19]](#footnote-19)

1. Islam

Islam adalah syarat untuk seseorang dapat diterima kesaksiannya. Dalam hal ini, Imam Taqiyuddin berkata : “Maka saksi tidak dapat diterima dan orang kafir z}alim atau kafir harbi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir.

1. Balig

Allah swt berfirman :

“.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu....”(QS *Al-Baqarah* : 282)

Kemudian sabda Nabi :

“Dari ‘Aisyah r.a., Nabi saw bersabda : ”Bebas dari tindakan hukum terhadap tiga orang, yaitu : Orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal atau sadar”. (HR Ahmad dan Imam empat kecuali Tirmidzi)

1. Berakal
2. Adil
3. Dapat Berbicara
4. Baik ingatannya
5. Bersih dari Tuduhan
6. Ijab dan kabul (*Shigat* akad nikah)

Adapun yang di maksud dengan *shigat* akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Adapun ketentuan hukum *shigat* adalah :[[20]](#footnote-20)

1. Setaranya calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, dimana calon mempelai laki-laki adalah orang yang merdeka, berahlak mulia, beragama serta jujur.
2. Perwakilan diperbolehkan di dalam akad nikah.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan disebutkan Syarat-syarat Perkawinan adalah :

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dari bunyi Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa calon pengantin yang berumur dibawah usia 21 tahun dianggap belum dewasa untuk itu perlu mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya yang merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya suatu perkawinan.

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
2. Pada asasnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya, kecuali mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan (untuk kebolehan poligami) dengan dipenuhinya persyaratan tertentu.
3. Pria harus berumur 19 tahun dan Perempuan berumur 16 tahun.
4. Harus mendapat izin dari kedua orang tua masing – masing, kecuali dalam hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan apabila usianya belum mencukupi.
5. Tidak termasuk larangan – larangan untuk melakukan perkawinan (memiliki hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan berhubungan saudara dengan isteri apabila akan melakukan poligami, serta memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.
6. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali adanya dispensasi dari Pengadilan.
7. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur dalam hukum/peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan.[[21]](#footnote-21)
10. Kriteria Calon Suami Isteri dalam Islam

Seorang wali sudah selayaknya memilih dalam menentukan suami yang tepat bagi anaknya, yaitu mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik, akhlak yang baik, kemuliaan dan segala bentuk kebaikan lainnya. Sehingga apabila mereka menikah, laki-laki tersebut dapat memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Jika memang pernikahan adalah menyandingkan sifat dengan sifat maka dasar penerimaan dan penolakan lamaran haruslah juga akhlak dan agama. Begitu pula sebaliknya seorang pria dalam menentukan calon isteri berpedoman pada agama dan akhlaknya.

Allah swt berfirman :



”.... tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. *Al-Baqarah* : 216)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, manusia berada dalam ketidaktahuan, sehingga apa-apa yang dicintainya tidak diketahuinya apakah baik atau tidak. Karena ketidaktahuan ini, manusia berada dalam dualisme keserbamungkinan ketika ia mencintai sesuatu (seseorang), yaitu cinta yang membawa kebaikan atau sebaliknya. Jodoh ideal adalah jodoh yang seharusnya membawa kebaikan, jodoh ideal dapat dicapai atau ditemukan apabila yang bersangkutan menyerahkan semua urusan perjodohan kepada Allah swt.[[22]](#footnote-22)

Termasuk tindak sofistikasi (pemalsuan atau penipuan persepsi) bahkan paganisme yang menyalahi sunnah dan membuat kondisi kehidupan tidak stabil jika meninggalkan apresiasi terhadap agama dan akhlak dan memilih kriteria calon suami atau isteri selain keduanya seperti kekayaan, jabatan, kedudukan, ras, warna kulit dan sejenisnya.[[23]](#footnote-23) Islam sendiri telah meletakkan asas perbandingan manusia seperti dalam firman Allah swt surat *Al-Hujarat* ayat 13 :



*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kemudian bagaimana kriteria calon suami ideal dalam Islam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon suami yaitu :[[24]](#footnote-24)

1. Islam

Kriteria ini menjadi syarat awal bagi seorang wanita dalam memilih calon suami. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat *Al-Baqarah* ayat 221 :



*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

1. Berilmu dan baik akhlaknya

Masa depan kehidupan suami isteri erat kaitannya dengan memilih suami, maka Islam memberi anjuran agar memilih akhlak yang baik, saleh dan taat beragama. Islam juga memiliki pertimbangan dan ukuran tersendiri dengan meletakkannya pada dasar takwa dan akhlak serta tidak menjadikan kemiskinan sebagai celaan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai pujian.

Laki-laki yang memiliki keistimewaan adalah laki-laki yang mempunyai ketakwaan kesalehan akhlak serta mengetahui hukum-hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan isteri dengan baik.[[25]](#footnote-25)

1. Kuat Agamanya

Nabi saw bersabda :

عن أبى هريرة رضي الله عنه عنِ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال : تُنْكحُ المرأةُ لِأرْبعٍ لِما لِها ولِحسبِها ولِجما لِها ولِدِيْنِها ظْفرْ بِذا تِ الدِّينِ ترِبتْ يداك. (رواه البخرى ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Perempuan itu dinikahi karena empat macam, yaitu karena hartanya, pangkat atau keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka ambillah perempuan yang taat kepada agama, niscaya engkau akan beruntung. (HR. Bukhari dan Muslim).[[26]](#footnote-26) Dari hadis ini menunjukkan bahwa, kesalehan seseorang tidak hanya dari satu sisi. Akan tetapi, harus dilihat secara utuh dalam kehidupan yang nyata.[[27]](#footnote-27)

Kriteria memilih calon suami yang ideal harus pula diterapkan dalam menentukan calon isteri yang ideal.

1. Kedewasaan dalam Perkawinan

Undang – Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan dapat dilaksanalan apabila kedua calon pengantin telah dewasa, yaitu Pria harus berumur 19 tahun dan Perempuan berumur 16 tahun. Persyaratan umur tersebut berkaitan dengan kedewasaan pasangan untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan dalam Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Mulia Kusuma, mengklasifikasikan usia pekawinan kedalam 4 golongan yaitu sebagai berikut:

1. Umur rata-rata perkawinan pertama < 17 tahun disebut perkawinan anak-anak (*Chall Marigae*)
2. Umur 18-19 tahun disebut pekawinan berusia muda (*Early Marigae*)
3. Umur 20-21 tahun disebut perkawinan pada usia dewasa (*Immaturity Marigae*)
4. Umur >22 tahun disebut perkawinan pada usia lanjut (*Late Marigae*).

Kedewasaan dalam Islam dikenal dengan istilah baligh. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal di bawah ini.

1. Apabila seorang anak perempuan telah berumur sembilan tahun dan telah mengalami haidh (menstruasi). Artinya apabila anak perempuan mengalami haidh (mentruasi) sebelum umur sembilan tahun maka belum dianggap baligh. Dan jika mengalami (haidh) mentruasi pada waktu berumur sembilan tahun atau lebih, maka masa balighnya telah tiba
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur sembilan tahun dan pernah mengalami mimpi basah (mimpi bersetubuh hingga keluar sperma). Artinya, jika seorang anak (laki maupun perempuan) pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur sembilan tahun, maka belum dapat dikata sebagai baligh. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur sembilan tahun maka sudah bisa dianggap baligh.
3. Apabila seorang anak baik laiki-laki maupun perempuan telah mencapai umur lima belas tahun (tanpa syarat). Maksudnya, jika seorang anak laki maupun perempuan telah berumur lima belas tahun, meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendaptkan haid (menstruasi) maka anak itu dianggap baligh.[[28]](#footnote-28)

Jika seseoarang mempunyai dua alat vital, maka dalam isam memberikan dua cara untuk mengetahui ciri baligh orang tersebut, yaitu :

1. jika kelur main mandinya ( sperma) dari dzakarnya (penis) dan haid dari farjinya (venis) maka orang tersebut menurut syariat sudah dikatan baligh.
2. dan bila keluar air mani (sperma) atau haidnya dari salah satu alat vital tersebut, maka orang tersebut belum bisa dikategorikan baligh.[[29]](#footnote-29)

Baligh dapat dimaknai sebagai sebuah masa dimana seorang mulai dibebani (ditaklif) dengan beberapa hukum syara’. Oleh karena tuntutan hukum itulah orang tersebut dinamakan mukallaf.  Sebenarnya tidak semua baligh disebut mukallaf, karena ada sebagian baligh yang tidak dapat dibebani hukum syara’ seperti orang gila. Disinilah kemudian muncul istilah aqil baligh yaitu orang yang telah mencapai kondisi baligh dan berakal sehat (mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah).

Dengan demikian baligh dalam bahasa fiqh merupakan satu fase dalam usia seseorang di mana yang bersangkutan tak bisa lagi mengelak dari tanggung jawab dalam urusan ibadah. Baligh juga menjadi syarat bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban lain, seperti dalam muamalah atau transaksi dan membuat perjanjian atau berjual beli. Kegiatan muamalah atau perdata dan hukum keluarga dilakukan manakala seseorang telah dianggap baligh dan sekaligus sudah cakap dalam mengelola keuangan (*ahliyat al-tasharruf*).

Dalam QS. Al-Nisa 6, yang berbunyi;
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿النساء:٦

*﴾“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”. [QS. Al-Nisa: 6]*

Kalau kita simak ayat tersebut, terdapat kata baligh yang digunakan dalam konteks membicarakan seseorang yang cukup umur untuk kawin. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan bahwa indikasi cukup umur untuk kawin adalah dengan adanya kecerdasan dan kecakapan seseorang dalam mengelola keuangan, yang disebut dengan rusyd. Memang rusyd dalam Alquran tidak dibatasi oleh usia tertentu. Hanya terdapat indikasi-indikasi dan tanda-tanda seperti sudah mempunyai kepribadian yang dewasa, punya kemandirian sikap, dan mampu mengatur ekonomi dan mengatur diri sendiri.

Kata baligh seharusnya tak boleh berdiri sendiri melainkan harus digandeng dengan kata ‘aqil. ‘Aqil dan baligh memang kata yang mengandung arti yang berbeda. Tapi kalau dalam konteks tertentu keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana konteks taklif (mulai diberlakukannya kewajiban menjalankan ajaran agama), dan orang yang ter-taklif atau mukallaf (individu yang pada dirinya sudah dibebani ajaran agama). Kata aqil-baligh itu sendiri muncul dan digunakan dalam konteks seseorang yang sudah menjadi mukallaf. Mukallaf itu tidak bisa direduksi hanya soal usia baligh biologis saja, melainkan juga baligh mental sosialnya yang didasarkan kepada kemampuan dalam berpikir, 'aqil/akil.

Secara sederhana, ‘aqil merupakan kata subyek yang artinya “orang yang berakal”. Namun sering kali ‘aqil diartikan secara sederhana sebagai lawan kata majnun (gila). Padahal yang dikehendaki dengan ‘aqil adalah fase-fase kedewasaan dan kesadaran manusia. Untuk menuju baligh, ada usia yang disebut dengan usia tamyiz. Artinya usia manusia berakal yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Dalam fase tamyiz saja sudah jelas manusia harus mendayagunakan akalnya dengan menyerap pengetahuan. Umumnya ulama menyebut fase tamyiz  ini dimulai pada usia 7 tahun saat dimana akal dapat digunakan sesuai umurnya. Sebab tidak akan bisa mencapai fase tamyiz itu tanpa akal dan tanpa pendidikan. Dan jika akal manusia pada usia 7 tahun masih belum bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, maka dia belum tergolong fase tamyiz. Namun  pada fase tamyiz inilah dimulainya pengenalan doktrin agama, terutama soal ibadah meskipun belum wajib diamalkan.

Setelah fase *tamyiz*, dikenal dengan fase *murahiq* (remaja atau pubertas). Secara psikologis, fase murahiq merupakan fase yang secara kejiwaan masih labil, puberitas, dan fase mencari jati diri. Dalam perspektif fiqh klasik, seseorang yang memasuki fase *tamyiz* biasanya mulai usia 7 tahun sampai usia baligh yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan kalau menurut as-Syafii dan 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun menurut Abu Hanifah. Sedangkan fase *muraheq*, menurut Imam as-Syafii dimulai dari usia baligh (15 tahun) sampai sekitar 17 atau 18 tahun.
Fase berikutnya yaitu fase *rusyd*. Yaitu fase dimana seseorang yang telah memasuki usia dewasa, jiwanya betul-betul matang, pantas dan sudah punya kecakapan untuk berbisnis mengelola keuangan dan menikah. Fase *rusyd* ini merupakan fase baligh secara mental, kejiwaan, pemikiran, yang terjadi setelah atau pasca baligh secara fisik biologis. *Rusyd* ini lebih kepada kematangan berfikir dan kedewasaan psikologis sehingga seseorang sanggup menerima beban berat. Ini sangat berkaitan dengan ‘aqil. Karena itu ‘aqil dan baligh tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan untuk menghindari baligh tapi *safiq* (tidak berpendidikan), maka tentunya seseorang harus terlebih dahulu belajar, sekolah dan berpengetahuan yang sudah pasti membutuhkan waktu dan usia.

Adanya perbedaan pendapat antar ulama (khilafiyah) dan tidak ada konsensus di dalamnya menunjukkan bahwa itu adalah persoalan yang bersifat ijtihadi. Artinya, tidak ada ketegasan tekstual yang bersifat pasti. Karenanya keputusan diserahkan pada para ulama untuk memutuskan melalui penggalian dan penalaran rasionalitasnya berdasarkan kaedah dan metode yang mereka pilih. Karenanya perbedaan latar belakang teriorial, sosio-kultur, sosio-ekonomi dan sosio-politik dapat mempengaruhi keputusan ulama dalam berijtihad. Demikian halnya dengan persoalan batasan usia baligh. Dalam khazanah klasik Islam, atau di pesantren disebut kitab kuning, ulama pada umumnya terbelah ke dalam dua pendapat yang berbeda. Pertama, pendapat Imam as-Syafi'i yang menyatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Kedua, Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki, dan 17 tahun bagi perempuan.

Konteks dimana ulama berada dan mengembangkan pemikirannya serta konteks sosial politiknya niscaya berpengaruh kepada pendapatnya. Imam as-Syafii adalah seorang ulama asli bangsa/suku Arab. Bahkan nasabnya diklaim nyambung sampai ke Nabi Muhammad saw. Sejak kecil hingga dewasa hidup dalam kultur Arab. Masa pengembaraan pencarian ilmunya juga di semenanjung Arab. Latar belakang kultural dan sosialnya yang mengkonstruksi intelektualitas ke-faqih-an al-Syafi’i adalah Arab. Setelah pindah ke Irak, pendapat-pendapatnya didengar dan diikuti pengikut setia. Di Irak lahir pendapat-pendapatnya yang disebut sebagai qaul qadim (pendapat lama). Dari Irak  ia pindah ke Mesir. Di Mesir, setelah melihat kultur dan budaya Mesir yang berbeda dengan Arab dan Irak, serta budaya agraris yang berbeda dengan budaya gurun pasir, ia kemudian merevisi pandangan-padangannya terdahulu. Tercetuslah pandangan-pandangannya yang disebut dengan qaul jadid (pendapat baru) yang merevisi pendapat lama terutama dalam bab bersuci.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah adalah ulama yang berasal dari Persia. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bergaul dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat kosmopolitan. Tak mengherankan karena ia juga seorang saudagar. Sehari-harinya ia bergaul dengan orang pasar, yang meniscayakan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Selain itu, di Persia filsafat tumbuh subur.
Kalau dilihat dari latar kultur dan sosiologis yang berbeda di antara keduanya, yaitu Imam Al-Syafii  tumbuh kembang dalam kultur Arab dan Imam Abu Hanifah dalam kultur Persia, maka bisa dimengerti jika keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami definisi dan makna baligh itu. Bias kultural itu bisa terlihat dalam pendapat-pendapatnya. Dr. Nashr Hamid Abu Zaid menengarai adanya bias Arabisme dalam pendapat-pendapat as-Syafii.

Dampak perbedaan pendapat tersebut bagi dunia muslim bisa kita lihat dalam memaknai batasan umur itu. Kita bisa lihat dalam sejarah pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia baligh lelaki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun pernah diterapkan pada zaman Turki Ottoman. Bahkan madzhab Abu Hanifah adalah madzhab resmi Turki Ottoman. Pada Abad ke-14 M, Turki Ottoman menerapkan undang-undang pembatasan usia perkawinan dengan standar tersebut, yaitu usia 18 tahun ke atas bagi laki-laki dan 17 tahun ke atas bagi perempuan. Demikian halnya ketika menentukan batas aurat perempuan, di mana pendapat Abu Hanifah lebih moderat dan cocok bagi kaum pekerja yang membutuhkan mobilitas cepat.
Sementara di Indonesia sendiri mayoritas muslim menganut madzhab Syafi’i. Sebagai mana di sebutkan bahwa usia baligh menurut Syafi’i adalah 15 tahun. Sehingga dalam undang-undang perkawinan No. 1, tahun 1974 diterapkan batas usia kawin adalah 16 tahun. Ini jelas merupakan pengaruh dari pandangan al-Syafi’i yang menyatakan bahwa baligh adalah setelah usia 15 tahun.

Aturan hukum di Indonesia, terutama soal batas usia nikah, sangat dipengaruhi oleh paham keagamaan dan kebudayaan, oleh karena itu perlunya menginterpretasikan ulang secara kritis teks- teks keagamaan terkait batas usia nikah. Pandangan ulama mazhab berbeda dalam menentukan batasan usia baligh. Pendapat Imam as-Syafi'i yang menyatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki, dan 17 tahun bagi perempuan. Konteks dimana ulama berada dan mengembangkan pemikirannya serta konteks sosial politiknya niscaya berpengaruh kepada pendapatnya.

Ulama fikih sepakat bahwa aqil baligh menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, berakal menjadi syarat wajib salat, puasa, dan sebagainya. Dalam muamalah, terutama masalah pidana dan perdata. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting mengetahui batasan antara baligh dan tidak baligh, karena ini merupakan kunci memasuki hukum syara’. Dalam bahasa keseharian sering dikatakan bahwa baligh menjadi batasan amal seorang anak dihitung pahala dan dosanya.

Dengan kata lain, seseorang yang sudah baligh dibebani hukum syara’ apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan orang gila tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk, maupun benar dan salah. Rasulullah SAW bersabda, “Diangkatkan pena (tidak dibebani hukum) atas tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh." (HR Abu Dawud). Orang gila dalam hadis ini menunjukkan orang yang tidak berakal.

Pada manusia penanda kedewasaannya harus berhimpitan antara dewasa fisik (haid) dan sosial (tanggungjawab, matang, mandiri). Ini juga sebagai bukti bahwa manusia itu hewan yang berpikir (*al-insan hayawanu al-nathiq*). Kedewasaan (baligh) yang menggunakan parameter mentruasi, mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini di dalam masyarakat. Apalagi dikalangan ulama sendiri masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, dengan menggunakan argumentasi keagamaan. Ada tiga alasan yang menjadi justifikasi ketika praktik kawin anak (usia dini) dilakukan dan menggunakan argumentasi keagamaan: Pertama, praktik perkawinan Nabi dengan ‘Aisyah. Umat Islam yang mentolerir kawin anak yang terbesar adalah disebabkan Nabi Muhammad menikahi ‘Aisyah yang diyakini oleh mereka dalam sejarahnya masih berusia 7 tahun dan digauli pada usia 9 tahun. Hadis ini dijadikan dalil untuk melegitimasi kawin anak. Kedua, soal baligh. Soal ini juga termasuk argumentasi keagamaan bagi mereka yang mentolerir kawin anak. Bagi mereka usia baligh yang ditandai haidl dianggap sudah siap menerima tanggungjawab dalam ibadah ritual, mualamah dan perkawinan. Menurut pandangan ini, seseorang yang sudah baligh berarti sudah mukallaf. Mukallaf artinya seseorang yang sudah wajib melaksanakan perintah dan larangan agama. Sehingga dia sudah bertanggungjawab atas perbuatan sendiri. Ketiga, kawin anak juga terkait dengan pengertian wali mujbir. Mereka masih punya keyakinan bahwa orang tua berhak memilihkan jodoh bagi anaknya. Ini biasanya terjadi pada anak perempuan. Sebab, menurut mereka, perempuan yang masih gadis adalah hak bapaknya dan boleh dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya selaku wali mujbir. Wali mujbir artinya ayah biologis atau kerabat biologis yang bisa ‘memaksakan kehendaknya’ tanpa meminta restu dari anak yang bersangkutan. Jika sang gadis terdiam ketika ditawarkan untuk kawin, maka sudah dianggap cukup sebagai pertanda ia mau dinikahkan. Ini kerap menjadi alasan berlangsungnya praktik perkawinan usia dini.

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa kriteria usia anak. Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa batas usia anak adalah usia 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Usia 18 tahun juga diadopsi untuk UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, usia 18 tahun untuk menghadap dan untuk saksi. Sementara UU Pemilu No 8 tahun 2013 menyebut usia 17 tahun atau sudah kawin yang mempunyai hak pilih. Usia 17 tahun juga ditetapkan dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk. Sementara menurut KUH Perdata, yang sudah tidak dianggap anak adalah usia 21 tahun atau sudah menikah. Tidak adanya satu kata dalam menetapkan kriteria anak (di bawah umur) menjadi persoalan tersendiri, karena menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7, usia yang diijinkan kawin untuk laki-laki 19 tahun, sedangkan untuk perempuan 16 tahun. Sebenarnya dalam pasal 50 pada UU yang sama menyebutkan bahwa sebelum usia 18 tahun, anak berada di bawah kekuasaan wali.

Meskipun Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diberlakukan selama 42 tahun, yang disusul kemudian dengan terbitnya Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, namun masih banyak pelanggaran pernikahan yang *law enforcement*-nya sangat lemah. Salah satu pelanggaran mengenai hal ini adalah kasus-kasus pernikahan usia anak. Sementara perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Jadi, kedewasaan menjadi ukuran boleh tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum.[[30]](#footnote-30)

Perkawinan dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia utuk melangsungkan pernikahan seperti dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 tertera bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan untuk pria telah berusia 19 tahun ( sembilan belas ) tahun dan wanita sudah mencapai usis 16 tahun ( enam belas ) tahun, secara eksplisit ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan atau pernikahan yang di lakukan oleh calon Pengantin yang pria belum berusia 19 tahun dan atau wanitanya belum berusia 16 tahun di sebut sebagai Pernikahan di bawah Umur atau Pernikahan Usia Dini. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial-budaya,ekonomi,pendidikan,kesehatan maupun psikis

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini.Pertama,masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bias memeroleh penghidupan yang lebh baik. Kedua, kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.Ketiga,social-budaya atau adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia.Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat  mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya :[[31]](#footnote-31)

* Pendidikan anak terputus : pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
* Kemiskinan : dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
* Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
* Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri
* Anak yang dilahirkan : Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini
* Kesehatan Reproduksi : kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.
	1. Teori tentang persepsi, peran dan strategi

Secara etimologis, persepsi atau perception berasal dari bahasa Latin perceptio; dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil[[32]](#footnote-32). Menurut Bimo Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.[[33]](#footnote-33)

Menurut Moskowitz dan Orgel, persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Selain itu menurut Davidoff[[34]](#footnote-34) dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri.

Persepsi merupakan proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera atau data. Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus. Persepsi juga merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indra. Persepsi manusia, baik berupa persepsi positif maupun negatif akan mempengaruhi tindakan yang tampak.

Proses Persepsi Menurut De Vito[[35]](#footnote-35), tahap-tahap dalam proses persepsi tidaklah saling terpisah benar. Dalam kenyataan, prosesnya bersifat kontinu, bercampur-baur, dan bertumpang-tindih satu sama lain yang dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini, yaitu:



Pada tahap pertama, alat-alat indra distimulasi (diransang), lalu ransangan terhadap alat indra diatur menurut berbagai prinsip, yaitu prinsip proksimitas (proximity) dan kelengkapan (closure). Tahap yang ketiga adalah stimulasi alat indra tersebut ditafsirkan-dievaluasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bimo Walgito[[36]](#footnote-36), yang menyatakan bahwa: “proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.” Prinsip dasar mengenai persepsi menurut Slameto[[37]](#footnote-37), yaitu:

1. Persepsi itu relatif bukan absolut
2. Persepsi itu selektif.
3. Persepsi itu mempunyai tatanan
4. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerimaan rangsangan).
5. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

Menurut Bimo Walgito[[38]](#footnote-38) objek persepsi dapat dibedakan atas objek yang non manusia dan manusia. Objek persepsi yang berujud manusia ini disebut person perception atau juga ada yang menyebutkan sebagai *social perception*. Pada objek persepsi manusia, manusia yang dipersepsi mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan, ataupun aspek-aspek lain seperti halnya pada orang yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi. Karena itu, pada objek persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi, lingkungan yang melatarbelakangi objek persepsi, dan perseptor sendiri akan sangat menentukan dalam hasil persepsi.

Soerjono Soekanto[[39]](#footnote-39),mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Poerwadarminta[[40]](#footnote-40), peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia dikatakan menjalankan suatu peranan. Peranan itu sendiri lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat sert menjalankan suatu peranan. Selanjutnya juga disebutkan bahwa suatu peranan mungkin mencakup paling sedikit 3 hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dimana setiap orang dalam suatu organisasi di masyarakat menjalankan sebuah peranan sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perilaku seseorang dan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan - perbuatan orang lain. Sehingga dengan demikian akan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan perikelakuan sekelompoknya

Menurut Siagian[[41]](#footnote-41), fungsi pemerintah negara pada hakikatnya berupa fungsi pengaturan dan pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Davey[[42]](#footnote-42) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain *pertama* sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. *Kedua* , fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. *Ketiga* , fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. *Keempat*, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. *Kelima*, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah dan ulama maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah atau ulama yang menjalankan tugas-tugas negara atau keagamaan dan fungsi-fungsi pemerintahan dan atau keagamaan di Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Bidang Hukum Setda Kabupaten Banyumas dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus[[43]](#footnote-43) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn[[44]](#footnote-44) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan - tujuan utama, kebijakan - kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert[[45]](#footnote-45), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 prespektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa yang ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang akhirnya dilakukan (*eventually does*). Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai menentukan dan mencapai tujuan dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para pemimpin memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi. Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap orang pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi seseorang yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.

Goldworthy dan Ashley, mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :

1. harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
2. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata - mata pada pertimbangan keuangan.
4. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah keatas.
5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
6. Fleksibilitas adalah sangat esensial.
7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.
	1. Tinjauan Umum tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan

Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam negara demokratis, menegaskan bahwa peraturan negara yang memuat sanksi pemaksa yang dapat menjangkau jauh terhadap hak-hak rakyat berupa perampasan harta benda atau perampasan kebebasan, perlu dibentuk dan diberitahukan dengan prosedur yang ditentukan sendiri oleh rakyat melalui peraturan yang ditetapkannya sendiri atau ditetapkan dengan persetujuannya, melalui wakil – wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, Negara berpedoman pada politik perundang-undangan, yang merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa kewenangan atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan adalah hanya negara atau Pemerintah

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu implementasi dari negara hukum, negara sebagai entitas tunggal, otonom dan absolut dalam mengatur tingkah laku warganya menyusunnya dalam suatu klasifikasi, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Undang – undang dalam arti formil adalah keputusan tertulis sebagai hasil pembahasan antara legislatif (DPR) dengan eksekutif (Presiden) yang berisi aturan yang bersifat dan mengikat/berlaku umum. Hal ini dipertegas dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, yang dimaksud undang – undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

|  |  |
| --- | --- |
| a. pengayoman;  | b. kemanusiaan; |
| c. kebangsaan; | d. kekeluargaan; |
| e. kenusantaraan; | f. bhinneka tunggal ika; |
| g. keadilan; | h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; |
| i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau | j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. |
| k. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. |

Dalam menyusun sistematika peraturan perundang – undangan, Indonesia menerapkan Hirearki Norma Hukum *(Stufenbau Theory*) yang dicetuskan Hans Kelsen dan dikembangkan Hans Nawiasky. Penerapan Stufenbau dimaksud dapat dilihat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III Tahun 2000 (Tap MPR III/2000). Tap MPR III/2000 tersebut mengatur bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-undang

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

Selanjutnya Tap MPR Nomor III Tahun 2000 mengatur sebagai berikut :

a. Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (1))

b. Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat atau yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan perundang-undangan yang dimuat dalam Tap MPR III/2000 (Pasal 4 ayat (2).

Undang – undang yang khusus mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang – undangan, lahir di era reformasi, yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang-undang 10 Tahun 2004, ditegaskan bahwa :

1. Jenis dan hirearki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang setingkat dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama denga kepala desa atau nama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seiring perjalanan dan perkembangan negara dan politik, Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 diganti dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Dalam Bab III yang mengatur jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, yang berbunyi :

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Penyebutan jenis peraturan perundang – undangan di atas sekaligus merupakan hierarki atau tata urutan peraturan perundang – undangan sekaligus menggambarkan tata urutan kekuatan mengikat dari peraturan perundang – undangan tersebut. Suatu peraturan perundang – undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundangan yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai pada peraturan perundang – undangan yang paling tinggi kedudukannya. Konsekuensinya peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tidak bersifat final dan limitatif, karena terdapat jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang – Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ini.

Menurut pasal 5 UUD 1945 selain presiden, DPR juga berhak mengajukan RUU yang disebut dengan hak inbsiatif, dimana ketentuan akan hal itu terdapat dalam pasal 21 UUD 1945.

Bagir Manan mengemukakan pula tentang fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu[[46]](#footnote-46)

1. Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi :

a. Fungsi penciptaan hukum.

Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum  dilakukan atau terjadi melalui  beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara*,* dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secaratidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena Sistem hukum Indonesia – sebagai akibat sistem hukum Hindia Belandia – lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk  sistem hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law)*.

b. Fungsi pembaharuan hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen  yang
efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan Sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi. Hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional  (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak
sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan.

c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum.

Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem
hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: “sistem hukum
kontinental (Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya lslam) dan sistem hukum nasional”.Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum – terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataanyang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

c. Fungsi kepastian hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty)* merupaken asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan depat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

1. Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
2. Konsisten dalam perumusannya -baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sietematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan  bahasa. Konsisten secara eketern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara *herbagrii* peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.
Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa
yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak
berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum -baik
dalam  arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.
4. Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:
	1. Fungsi perubahan

Telah lama  di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as* *social engineering*). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk  untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

* 1. Fungsi stabilisasi

Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjami stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem soeial budaya yang telah ada.

* 1. Fungsi kemudahan

Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan
sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas).
Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Asas hukum merupakan tiang utama bagi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, asas adalah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai *basic truth* , sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum, dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya, dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa asas formal dan material yang harus perhatikan antara lain sebagai berikut:

* + 1. Asas Formal
	1. asas tujuan yang jelas.
	2. asas lembaga yang tepat.
	3. asas perlunya pengaturan.
	4. asas dapat dilaksanakan.
	5. asas konsensus.
		1. Asas Material

a. asas terminologi dan sistematika yang benar.

b.  asas dapat dikenali

c. asas perlakuan yang sama di depan hukum.

d. asas kepastian hukum.

e. asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.

            Berbeda lagi dengan  ***A. Hamid S Attamimi*** menurutnya asas material terdiri :

1.      asas sesuai dengan cita hukum dan norma fundmental negara.

2.      asas sesuai dengan hukum dasar negara.

3.      asas sesuai dengan prinsip negara hukum.

4.      asas sesuai dengan prinsip negara berdasar konstitusi.

5.      asas keadilan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

6.      asas ketertiban, perdamaian, pengayoman dan perikemanusiaan.

Peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya memuat landasan berikut :

1.    Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan folosofis *(filisofische grondslag )* apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi mendapatkan alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan *( way of life )*, filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.

2.     Landasan Sosiologis

            Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis *(sociologische groundslag )* apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat., tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.

3.     Landasan Yudiris

            Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis *(rechtsground )* apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Disamping itu landasan yuridis mempertanyakan apakah peraturan yang dibuat sudah dilakukan oleh atas dasar kewenganannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundangundangan yang pada dasarnya dimulai dari :

1. Perencanaan

Mengenai perencanaan ini, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Undang- Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis sedangkan Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

1. Persiapan

Dalam hal persiapan penyusunan peraturan perundangan-undangan disebutkan bahwa Rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Pewakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang dimaksud tersebut adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. namun dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.

1. Pembahasan

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dimana pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud tersebut yaitu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat den daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan Dewan Perwakilan Daerah.

1. Pengesahan

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dimana penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud tersebutr dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Namun walaupun dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undangundang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

1. Pengundangan

Merupakan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

1. Penyebarluasan

Setelah semuanya itu selesai maka kemudian Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/ Kabupaten. Perda sendiri termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011, berada di Pasal 7 butir f, dan PERDA Kota/ Kabupaten di Pasal 7 butir g.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Yanuardi Syukur, *Keluargaku Surgaku : Pedoman Untuk Membangun Keluarga Menjadi Surga* (Jakarta : Al-Maghfirah, 2012), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Dilengkapi UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UURI No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria,* terj. Soesilo dan Pramudji R,..., hlm. 461. [↑](#footnote-ref-2)
3. Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 63-64. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ali*.* Sunarso, *Islam Praparadigma* *: Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009), hlm. 176. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali, 2010), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek : Dilengkapi UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaawinan, Kompilasi Hukum Islam, UURI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria,* terj. Soesilo dan Pramudji R,...,hlm. 506. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ali*.* Sunarso, *Islam Praparadigma* *: Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009), hlm. 176. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 42. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ali*.* Sunarso, *Islam Praparadigma* *: Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum*,...,hlm. 177. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid II*, terj. Moh. Abidun, dkk ,......., hlm. 312-314. [↑](#footnote-ref-10)
11. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj. Ida Nursida (Bandung : Al Bayan Mizan, 2005), hlm. 58. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ali Sunarso, *Islam Praparadigma : Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum*,...,hlm. 174. [↑](#footnote-ref-13)
14. Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ali Sunarso, *Islam Praparadigma : Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum*,...,hlm. 175. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*,..., hlm. 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,…, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,…, hlm. 111-114. [↑](#footnote-ref-19)
20. Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa ‘Aini, dkk (Jakarta : Darul Haq, 2008), hlm. 530. [↑](#footnote-ref-20)
21. Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu analisis dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 san Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 58 – 59*.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Suyadi as-Salmani, *Misteri Jodoh* (Yogyakarta : Pustaka Insan madani, 2009), hlm. 104-105. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani : Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 174. [↑](#footnote-ref-23)
24. Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*,…,hlm. 69. [↑](#footnote-ref-24)
25. Imam Wahyu Winaris*, Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*,…,hlm. 71. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i, Buku II : Muamalat, Munakahat, Jinayat,...,* hlm. 253. [↑](#footnote-ref-26)
27. Suyadi as-Salmani, *Misteri Jodoh* ,....., hlm. 113. [↑](#footnote-ref-27)
28. [http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,40361-lang,id-c,syariah-t,Tiga+Tanda+Baligh-.phpx](http://www.nu.or.id/a%2Cpublic-m%2Cdinamic-s%2Cdetail-ids%2C11-id%2C40361-lang%2Cid-c%2Csyariah-t%2CTiga%2BTanda%2BBaligh-.phpx) [↑](#footnote-ref-28)
29. [http://belajarislam-blog.blogspot.co.id/2014/12/*akil-baligh-menurut-islam.html*](http://belajarislam-blog.blogspot.co.id/2014/12/akil-baligh-menurut-islam.html) [↑](#footnote-ref-29)
30. Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,* dalam de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum STAIN Ponorogo, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 49-61 [↑](#footnote-ref-30)
31. [↑](#footnote-ref-31)
32. Alex Sobur, *Psikologi Umum*. (Bandung : Pustaka Setia, 2003), hlm. 45 [↑](#footnote-ref-32)
33. Bimo Walgito*.*. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) hlm. 99. [↑](#footnote-ref-33)
34. ibid [↑](#footnote-ref-34)
35. De Vito, Joseph A. .*Komunikasi Antarmanusia: (Jakarta : Professional books, 1997) hlm. 75* [↑](#footnote-ref-35)
36. Bimo Walgito, hlm. 102 [↑](#footnote-ref-36)
37. Slameto.). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. (Jakarta: Bina Aksara. 1995), hlm 103-105) [↑](#footnote-ref-37)
38. Bimo Walgito, hlm. 108 - 109 [↑](#footnote-ref-38)
39. Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 220 -221 [↑](#footnote-ref-39)
40. Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka1995), hlm. 571 [↑](#footnote-ref-40)
41. Sondang.P Siagian, *Administrosi pembangunan : : Konsep, Dimensi dan Strateginya (*Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-41)
42. Davey, Kenneth J.. *Pembiayaan pemerintah daerah, Praktek -Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja*. (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-42)
43. Marrus *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 31 [↑](#footnote-ref-43)
44. Mintzberg, Henry dan Quinn, James Brian.. *The Strategy Process : Concepts, Contexts and Cases*. (New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1999), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-44)
45. Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr.. “Manajemen Strategi, Edisi Imdonesia”.( Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-45)
46. https://innajunaenah.wordpress.com/2009/06/01/fungsi-peraturan-perundang-undangan/#\_ftn1 [↑](#footnote-ref-46)